**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Achmad Ali. 2002.*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung: Jakarta.

Adrian Sutedi. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah.* Sinar Grafika: Jakarta.

Ali Achmad Chomzah. 2002.*Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan*. Prestasi Pustaka: Jakarta.

A. Hamzah. 1991. *Hukum Pertanahan Di Indonesi.* Rineka Cipta: Jakarta.

A.Partanto dan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Arloka: Surabaya.

Bachtiar Effendie. 1993.*Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni: Bandung.

Cst Kansil. Christine. S.T Kansil. Engelien R.Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.

Dominikus Rato. 2010.*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.

Hardiyanti Hasan. 2017.*Analisis Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kota Makassar (Studi Kasu Sertifikat Ganda No.26/G/2014/PTUN.MKS)*.Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makassar.

Jimmy joses Sembiring. 2010. *Panduan mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia: Jakarta.

Muchsan.1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008.*Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta.

Poerwadarminta.1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Riduan Syahrani. 1999.*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*.Citra Aditya Bakti: Bandung.

Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah.*  Mandar Maju: Bandung.

Sri Wijayanti. 2010. *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro: Semarang.

Tika Nurjannah dan Firman Muin. 2016. *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar: Makassar.

Urip Santoso. 2008. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Kencana: Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan